

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil temuan penelitian di lapangan dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya peran Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota dalam mewujudkan Harkamtibmas di Kota Bekasi. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi kelompok faktor pendukung dan kelompok faktor penghambat, antara lain:

##### **1. Kelompok faktor pendukung**

- a. Kualifikasi Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota sudah baik dan memadai seperti pengetahuan, pemahaman, dan pendidikan sehingga dalam melaksanakan tugasnya di lapangan sudah berpengalaman dengan mempedomani Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Polmas.
- b. Jumlah Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota yang belum ideal, terbatasnya dukungan jumlah anggaran, dan sarana prasarana dalam melaksanakan program-program pembinaan masyarakat dan kegiatan lainnya tidak menjadi hambatan Petugas Polmas dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
- c. Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota memiliki motivasi dan semangat kerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meskipun masih adanya keterbatasan dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Adanya dukungan dari masyarakat, partisipasi aktif masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap Polmas di Kota Bekasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Polmas sehingga dapat membantu Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota dalam melaksanakan tugasnya menjaga Harkamtibmas.
- e. Adanya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait yaitu TNI (Babinsa), Pemda (Pegawai Kelurahan/Ketua RT/Ketua RW),

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dapat membantu Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota untuk melaksanakan program-program Polmas di masyarakat dan bersama-sama bersinergitas mewujudkan Harkamtibmas di Kota Bekasi.

- f. Peran Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota sudah dirasakan manfaatnya secara baik oleh masyarakat namun dalam penanganan kasus tawuran di Kota Bekasi masih menjadi hambatan dalam perwujudan Harkamtibmas.

## **2. Kelompok faktor penghambat**

- a. Belum seluruh Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai terkait Polmas dan pemahaman dalam penggunaan teknologi untuk melaksanakan tugasnya karena kurangnya pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi Petugas Polmas.
- b. Gaji dan tunjangan yang terbatas serta tempat tinggal Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota yang berjauhan dengan wilayah binaannya.
- c. Adanya keterbatasan sumber daya antara lain anggaran biaya, personel dan sarana prasarana dalam mendukung Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan kegiatan-kegiatan Polmas di Kota Bekasi.
- d. Adanya asumsi negatif yang beranggapan bahwa ditempatkan di fungsi Binmas adalah tempat buangan (bukan tempat favorit berdinamika) sehingga sulit menemukan anggota yang berminat untuk ditempatkan di Satbinmas Polres Metro Bekasi Kota.
- e. Kurangnya dukungan pimpinan berupa pemberian penghargaan, apresiasi atas kinerja dan kesediaan menghadiri dalam setiap kegiatan Polmas dengan masyarakat.
- f. Adanya pihak masyarakat yang belum bersedia untuk turut serta membantu dalam pelaksanaan Polmas dan menyerahkan masalah Harkamtibmas kepada aparat keamanan.

Berdasarkan pada temuan di lapangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya peran Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota tersebut di atas langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam rangka upaya penguatan peran Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota dapat dilakukan dari berbagai aspek, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas kompetensi Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek kepolisian, aspek sosial, hingga aspek budaya untuk menambah kualifikasi kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.
2. Peningkatan ketersediaan sumber daya yang memadai meliputi penambahan jumlah personel yang ideal, penambahan anggaran biaya yang memadai dalam mendukung program dan kegiatan Polmas serta pemenuhan sarana prasarana berupa kendaraan, perlengkapan dan fasilitas pendukung lainnya.
3. Penguatan dukungan dari pimpinan dan atasan dapat berupa kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas Polmas, penghargaan atas prestasi yang diraih, serta pembinaan secara berkala untuk memperkuat peran Polmas Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota.
4. Peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat seperti memberikan informasi, melaporkan kejadian, dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Polmas dengan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat memahami pentingnya bersama-sama dengan Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota untuk mendukung perwujudan Harkamtibmas di Kota Bekasi.
5. Peningkatan kerja sama antara Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota dengan instansi terkait antara lain pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Polmas.
6. Sistem *reward* dan motivasi yang baik akan mendorong Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota untuk bekerja lebih profesional dan berprestasi berupa penghargaan, kenaikan pangkat, dan promosi jabatan.

7. Peningkatan pemahaman Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota dalam memahami kondisi lingkungan sosial budaya yang kondusif dan adat istiadat masyarakat setempat agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga memudahkan Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan Harkamtibmas.
8. Peraturan dan kebijakan yang mendukung peran Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota juga perlu dikaji dan disempurnakan sehingga memberikan kepastian hukum bagi Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota dalam melaksanakan tugasnya.
9. Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polmas juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Polmas antara lain teknologi informasi dan komunikasi, teknologi forensik, dan teknologi keamanan.
10. Evaluasi kinerja dan monitoring terhadap kegiatan Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota dilakukan secara berkala akan memberikan informasi tentang efektivitas pelaksanaan tugas Polmas. Informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota dan memperbaiki program Polmas.

**b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas terkait implementasi peran Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peneliti dapat memberikan saran antara lain:

1. Penempatan anggota Polri berpangkat Brigadir ke atas sebagai Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota karena sudah memiliki kemampuan, pengalaman mental dan emosional yang siap ketika berhadapan langsung dengan masyarakat.
2. Adanya peningkatan kemampuan para Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota dalam hal administrasi, pemanfaatan teknologi, *Public Speaking*, *Training of Trainer* (TOT) kepada jajaran fungsi Binmas sehingga Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota memiliki kapasitas

dan pengetahuan yang mumpuni dalam menghadapi segala persoalan yang berkembang di masyarakat dewasa ini.

3. Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota yang memiliki hambatan dan kendala dalam membuat pelaporan (administrasi) kegiatannya di lapangan, mengharapkan adanya penambahan anggota yang ditugaskan sebagai staf untuk mengurus administrasi pelaporan. Karena selama ini mereka mempekerjakan Pegawai Harian Lepas (PHL) dan menggajinya dengan menggunakan dana pribadi mereka.
4. Menempatkan anggota sebagai Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota di wilayah sesuai dengan tempat tinggalnya sehingga mempermudah komunikasi antara Polri dengan masyarakat dan anggota tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat di wilayah tersebut.
5. Kebijakan pimpinan dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan Polmas diharapkan berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan dan apabila berganti pimpinan, kebijakan pimpinan sebelumnya dievaluasi dan apabila sudah berlangsung dengan baik tetap dilanjutkan.
6. Wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota yang luas, dalam penerapan Program Polmas disesuaikan dengan karakteristik dan keberagaman masyarakat setempat sehingga implementasi Polmas dapat berlangsung secara optimal.
7. Dengan mengadopsi penerapan Polmas di Negara Jepang, setiap anggota Polisi yang telah selesai mengemban pendidikan pembentukan langsung ditempatkan sebagai Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota sampai mereka memiliki kemampuan dan kapasitas yang mumpuni untuk berdinamika di fungsi lain. Hal ini diharapkan bisa diterapkan oleh Polri, sehingga anggota Polri seluruhnya mendapat pengalaman dan mengabdikan dalam bidang Polmas baru ditempatkan pada fungsi lain di kepolisian.
8. Adanya sinergitas dan *Sharing Knowledge* dari fungsi lain kepolisian terutama, Sabhara, Serse, Binmas dan Intel untuk mendukung Petugas

Polmas Polres Metro Bekasi Kota dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

9. Adanya dukungan dari pimpinan baik dalam mengambil kebijakan, pemenuhan anggaran, sarana prasarana dan penambahan personel dalam mendukung pelaksanaan Polmas, terutama pemberian *Reward and Punishment* kepada Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota yang berprestasi dan yang telah melakukan pelanggaran hukum. Sehingga Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota termotivasi dalam melaksanakan tugasnya dan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi.
10. Adanya analisa dan evaluasi terhadap kemanfaatan pelaksanaan program kegiatan Polmas perlu dilakukan dengan menentukan skala prioritas terhadap kegiatan yang memang diperlukan untuk penambahan anggaran biaya dan yang tidak berjalan secara optimal dievaluasi atau digantikan dengan kegiatan lain yang lebih bermanfaat.
11. Beban pekerjaan yang sudah sangat padat yang dijalankan oleh Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota diharapkan adanya pengaturan jadwal pelaksanaan tugas. Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota dalam melaksanakan tugas di lapangan tidak dibebankan untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan apel dan piket rutin di kantor dan lebih berfokus kepada pelaksanaan tugas Polmas di lapangan.
12. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni terkait masalah waktu dan biaya penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan peran Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota. Oleh karena itu, penulis menyarankan di masa yang akan datang untuk dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama berkaitan dengan penguatan Peran Petugas Polmas Polres Metro Bekasi Kota yang lebih optimal dan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admynl. 2021. Kenali Jenis Kejahatan dalam Community Policing. Online. (<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/08/20/kenali-jenis-kejahatan-dalam-community-policing-2/>). Diakses 6 Juni 2023.
- Ardana, I Made, Swardhana, Gde Made. 2012. "Peran Polmas dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan Menggunakan Pendekatan Restoratif Justice (Studi kasus di Polres Badung)". *Journal Ilmu Hukum*. Volume 07, n 01, jan 2018 [S.I.], feb. 2018. ISSN 2303-0550. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2023. Online. (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>). Diakses 1 Juli 2023.
- Basri, Dr. H. Hasan. M.Ag, Rusdiana, Dr. H.A. (2015). *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Basyari, Nurcholish MA. (2019). *Jalan Lurus Reformasi SDM Polri*. Depok: Gramedia Media Baca.
- Data Personel Polda Metro Jaya. 2023. Aplikasi Sistem Informasi Personel Polri. Online. (<http://sipp.polri.go.id>). Diakses 1 Juli 2023.
- Dermawan, Mohammad Kemal. 2009. Disertasi Kemal\_Final\_Revisi Bab II Tunjauan Pustaka. Online. (<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127907-D%2000955%20Potensi%20pemolisian-%20Literatur.pdf>). Diakses 24 Januari 2024.
- Firhansyah, Muhammad. 2021. Apa Kabar Pelayanan Publik Polri?. Online. (<https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel---apa-kabar-pelayanan-publik-polri->). Diakses 2 Juli 2023.
- Hardiyansyah, Dr., M.Si. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Palembang: Gava Media.
- (2015). *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*. Palembang: Gava Media.
- Heri, Eko Indra. 2019. "Tantangan Pengembangan SDM Polri di Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 13, Nomor 2*. ISSN: 2620-5025. E-ISSN: 2621-8410. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

- Hia, Era Era. 2019. "The Role Of The Supervisor Board In Improving Drinking Water Service For The Community Of Tangerang Regency". *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Volume XI, Edisi 2, Desember 2019* 11(2), 35-51.
- Indarti, Erllyn. 2022. "Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Perwujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 51, Nomor 2*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
- Kadarisman, M. (2012). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kadarmanta, A. 2010. Polmas Sebagai Strategi Partnership Building. Online. (<https://kadarmanta.blogspot.com/2010/09/polmas-sebagai-strategi-partnership.html>). Diakses 24 Januari 2024.
- Meliala, Adrianus. 2020. "Peran Polisi Wanita dalam Polmas Berbasis Gender". *Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 14, Nomor 3*.
- Moeleong, M.A. Prof. Dr. Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Y. Bernandus, Ferdinand D. Saragih dan Umanto Eko. (2011). *Metode Kuantitatif*. Depok: Salemba Humanika.
- Nurcholis MA Basyari. (2019). *Jalan Lurus Reformasi SDM Polri*. Tangerang Selatan: Media Baca.
- Nurdin Ismail, Dr, Drs, M.Si dan Dra. Sri Hastati, M.Si. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jatinangor: Media Sahabat Cendekia.
- Oktopansyah, Saleh M. (2019). *Operasionalisasi Program Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kepolisian Resor (Polres) Banyuasin*. Master Thesis. Palembang: Program Pascasarjana Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Community Policing).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN, Bidang arah Kebijakan kamtibmas: Masyarakat Patuh Hukum dan Membangun Community Policing guna Mendekatkan Polisi dengan Masyarakat agar terbina Kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
- Politeknik STIA LAN Jakarta. (2021). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Jakarta: Politeknik STIA LAN.
- Polres Metro Bekasi Kota. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satwil Polres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya Tahun 2022*. Bekasi: Bagian Perencanaan Polres Metro Bekasi Kota.
- Puslitbang Polri*. (2023). "Penguatan Peran Pemolisian Masyarakat Dalam Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas Bagi Pembangunan Nasional Tahun 2022". *Jurnal Litbang Polri*, 2(1), 205-220.
- Putra, Billy Reza. 2022. "Peran Camat Dalam Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Institusi Pemerintah Dalam Negeri*.
- Putra, Yogi, Satima, Tarma, Netrivianti. 2021. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 43 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima". *Jurnal Ilmiah Ekotrans dan Erudisi Volume 1, No. 2 (23-30)*.
- Rahayu, Amy, Y.S., Vishnu Juwono, dan Krisna Puji Rahmayanti. (2020). *Pelayanan Publik dan E-Government Sebuah Teori dan Konsep*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Ramadhan, Rinaldi, Mulyadi, Mahmud. Marzuki. 2021. "Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam Mewujudkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai)". *Jurnal Ilmiah Metadata, Volume 3, No 1*.
- Rifai, Eddy. 2018. "Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung". *Jurnal Cepalo 2 (1):43-54*. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.176>.

- Rustandi, Abduh Thamrin, Suriani Seri. 2022. "Reformasi Birokrasi Polri Terhadap Pelayanan Publik dalam rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan". *Jurnal Paradigma Administrasi Negara, Volume 4 (2): 134-142, Juni 2022*.
- Sabandar, Switzy. 2022. Survei Litbang Kompas Sebut Citra Institusi Polri Terus Turun dalam 2 Tahun Terakhir. Online. (<https://www.kompas.tv/nasional/342427/survei-litbang-kompas-sebut-citra-institusi-polri-terus-turun-dalam-2-tahun-terakhir>). Diakses 1 Juli 2023.
- Samual, Rifaizal, Kasim, Azhar. 2020. "Strategi SDM Polri Mempersiapkan Generasi "Y" di Era Revolusi 4.0". *Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 14, Nomor 3*.
- Siahaan, Herikson Parulian, Marlina, Muaz Zul. 2019. "Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)". *Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1 (2) 2019: 137-147*.
- Simangunsong, Fernandes. (2017). *Kapita Selekta Manajemen Sumber Daya Aparatur*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy. (1994). *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Survei Indopol. 2022. Hasil Survei Indopol terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Polri dalam periode tanggal 18-25 Januari 2022. Online. (<https://indopolsurvey.id/rilis-survei-indopol.html>). Diakses pada tanggal 1 Juli 2023.
- Tawa, I Nyoman, Mandala, Saptala. 2020. "Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng". *Jurnal Hukum Volume 2, No.2*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wahid, Abdhika Salafi, Bahktiar, dan Mustaring. 2023. "Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Gangguan Keamanan dan ketertiban Masyarakat". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Hukum & Pengajarannya, Volume XVIII Nomor 1, April 2023 (halaman 148-161)*.
- Wardhani, Christi Mahatma, 2019. Pakar Sebut Rasio Polisi dan Masyarakat Tinggi. Online. (<https://jogja.tribunnews.com/2019/11/26/pakar-sebut-rasio-polisi-dan-masyarakat-tinggi>). Diakses 1 Juli 2023.

Yoshiaki, Sasaki. (2012). *Ringkasan Contoh Kongrit Kegiatan Petugas Polmas di Lapangan*. Bekasi: Proyek Bekasi 2011 Cetakan ke-2, 2015.

Zed, Angga Novrian. 2023. Konsep Pemolisian Masyarakat. Online. (<https://www.scribd.com/document/482050318/POLMAS-docx>). Diakses 7 Juni 2023.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A